

Implementasi Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru

Kaspul Kaspul¹, Zulkarnaini Zulkarnaini¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Submitted: 14 Mei 2022 Revised: 24 Juni 2022 Accepted: 28 Juni 2022 Available online: 30 Juni 2022</p> <p>Correspondence</p> <p>Kaspul Kaspul Email: kaspul0119@student.unri.ac.id</p>	<p>This study aims to find out how to implement the abolition of official vehicle assets belonging to the Pekanbaru City government and what are the inhibiting factors for implementing the abolition of official vehicle assets belonging to the Pekanbaru City government. This study used qualitative research methods with data collection methods using interviews, observation, and documentation. The results of this study are the implementation of the abolition of official vehicle assets belonging to the Pekanbaru City Government has gone well but has not been maximized. This is due to the inhibiting factors, namely weak document administration and the COVID-19 pandemic.</p>

Keywords: Implementation, Elimination of Assets, Vehicles, Service.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas Di Kota Pekanbaru di lakukan oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016. Sebagaimana dijelaskan bahwa BPKAD Kota Pekanbaru merupakan satuan pengelola keuangan dan aset daerah.

Terkhusus di Kota Pekanbaru, mendapatkan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dari BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020 lalu. Hasil ini merupakan apresiasi tertinggi bagi administrasi keuangan daerah Kota Pekanbaru. Bahkan hasil ini sudah didapatkan sebanyak 5 kali berturut-turut (Pekanbaru.go.id, 2021). Artinya disini pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pengelola keuangan dan aset daerah telah baik dalam mengurus pengelolaan aset daerah.

Namun, Berdasarkan pernyataan pihak BPKAD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa masih banyaknya kendaraan yang telah bebas masa pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan. Selain itu, masih banyaknya kendaraan dinas yang telah berahir masa manfaatnya dan rusak berat. Dalam penelitian ini peneliti memilih penghapusan aset kendaraan dinas yang telah bebas masa manfaa artinya ialah kendaraan dinas mantan ognum pejabat yang belum dihapuskan. Hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan dari pihak BPKAD yang menyatakan bahwa masih banyaknya kendaraan dinas yang telah bebas masa pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan.

Berdasarkan keterangan yang ditemukan peneliti mengambil beberapa fenomena. *Pertama*, masih banyaknya kendaraan yang telah bebas masa pemanfaatannya namun belum dilakukan penghapusan. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan. *Kedua*, masih adanya kendaraan dinas yang telah berahir masa manfaatnya dan rusak berat hal ini berdasarkan keterangan dari pihak BPKAD.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengu. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti kondisi objek secara alamiah dan menekankan hasil penelitian pada makna dari data yang sebenarnya (Sugiyono, 2014). Selain itu, penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang telah didapat dan diproses dengan makna mendiskripsikan suatu masalah (Paywala, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara yang dimaksud yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan yaitu Sub Bidang Penghapusan Aset, Sub Bidang Penilaian Aset, Sub Bidang Pemanfaatan Aset, Sub Bidang Pengawasan Aset. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data-data yang penulis dapatkan dari kantor BPKAD Kota Pekanbaru berupa dokumen-dokumen baik gambar, tertulis, maupun media elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Melihat adanya beberapa kendaraan dinas yang telah habis masa pakai dan rusak berat yang belum dihapuskan sesuai dengan fenomena yang ditemukan maka peneliti menggunakan teori Edward III (Yudiatmaja, 2016) tentang faktor yang mempengaruhi implementasi penghapusan aset. Adapun faktor yang indikator dalam penelitian ini ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Terutama dibagian pengelola keuangan dan aset daerah yang mana membutuhkan komunikasi yang sangat inten. Komunikasi diperlukan guna untuk menyamakan dan melancarkan tujuan dan proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun swasta (Permata & Khasanah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa antara sub bidang penghapusan aset dengan sub bidang penilaian, pemanfaatan dan pengawasan saling berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi dalam formal dan informal. Komunikasi ini dalam hal penilaian terhadap kendaraan dinas yang telah habis masa pakai dan telah rusak berat. Adapun penilaian terhadap kendaraan yang telah habis masa pakia dan rusak berat memiliki kategorinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa antar sub bidang penghapusan dengan sub bidang lainnya dalam mengelola aset khususnya mengelola penghapusan aset telah berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi bukan merupakan penghambat atau yang mempengaruhi tidak maksimalnya penghapusan aset yang terjadi khususnya penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah yang telah rusak berat dan habis masa pakai namun, belum dihapuskan. Selain dari pengaruh komunikasi, implementasi penghapusan aset juga bisa di pengaruhi oleh sumber daya.

Sumberdaya

Sumber daya ialah suatu hal yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi dan menjadi penentu dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi. Jika sumber daya yang dimiliki baik maka sebuah organisasi itu baik, jika sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu buruk maka organisasi itu buruk (Yudiatmaja et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki oleh BPKAD Kota Pekanbaru merupakan sumber daya yang kompeten dan berdaya unggul. Pegawai atau sumber daya yang ada di BPKAD merupakan sumber daya yang berasal dari PNS/CPNS dan non PNS yang

paling banyak ialah pegawai yang PNS/CPNS yaitu mencapai 50 orang sedangkan yang non PNS hanya mencapai 13 orang dari 50 PNS yang tersedia di BPKAD 1 orang yang golongan IIb, 1 orang yang golongan IIIa, 4 orang yang golongan IIIb dan 11 orang yang golongan IV a. berdasarkan hal tersebut dapat diamati bahwa dari tingkat golongan saja, pegawai BPKAD memiliki sumber daya yang unggul dan tentunya mampu untuk mengelola aset daerah dengan baik, terutama pada pengelolaan atau mengimplementasikan penghapusan aset kendaraan dinas yang telah habis masa guna dan masa pakai.

Dapat diketahui bahwa memang sumber daya yang dimiliki oleh BPKAD merupakan pegawai yang memiliki lulusan yang baik, dari yang paling tinggi yaitu pasca sarjana (S2) hingga yang paling rendah ialah SLTA. Sehingga dapat disimpulkan sumber daya bukan merupakan suatu hal yang mempengaruhi penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah tidak maksimal. Melainkan melihat sumber daya yang dimiliki memungkinkan untuk BPKAD memiliki kinerja yang baik dalam penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah yang telah habis masa pakai dan rusak berat.

Disposisi

Yang dimaksud dengan disposisi dalam penelitian ini ialah karakteristik atau watak seorang pegawai BPKAD dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangan dan aset daerah lebih tepatnya dalam mengimplementasikan penghapusan aset kendaraan dinas milik pemerintah yang telah habis masa pakai dan rusak berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Pengawasan dapat diketahui bahwa Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Pengawasan dalam bekerja menerapkan sifat jujur dalam menilai dan mengawasi. Namun, dalam hal ini menilai dan mengawasi yang dimaksud ialah menilai kendaraan dinas yang termasuk dalam kategori pantas untuk dihapuskan yaitu rusak berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BPKAD Kota Pekanbaru khususnya Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Pengawasan memiliki disposisi yang baik dalam melakukan implementasi penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Disposisi pegawai BPKAD Kota Pekanbaru ialah berkomitmen terhadap visi dan misi BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jujur dalam melakukan penilaian, pengawasan dan penghapusan aset yang mana dalam hal ini memang setiap pegawai BPKAD dituntut untuk jujur dalam pekerjaannya, selain itu pegawai BPKAD juga demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demokratis yang dimaksud ialah tidak berdasarkan ego sendiri melainkan berdasarkan atas peraturan dan aturan panitia penghapusan aset. Hal ini dimulai dari di turunkannya surat perberitahuan penilaian ke lapangan hingga dihapusnya aset kendaraan dinas yang telah habis pakai dari daftar barang milik daerah.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya menjalankan tugas atau melaksanakan tujuan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka SOP (*standar operating procedures*) setiap sub bidang muncul. Hal ini akan menjadi pedoman dan standar pelayanan sub bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Yudiatmaja et al., 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sub bidng penghapusan aset dalam melakukan implementasi memiliki SOP dan alur kebijakan Yng menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penghapusan aset kendaraan dinas yang rusak berat dan bukan sembarangan. Selain itu, dalam implemntasi penghapusan aset di bentuk panitia penghapusan yang emiliki struktur birokrasinya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam implementasi penghapusan kendaraan dinas yang rusak berat dan habis masa guna memiliki struktur birokrasi yang lengkap sehingga dapat di simpulkan bahwa

struktur birokrasi bukan menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi penghapusan aset kendaraan dinas yang telah rusak berat dan habis masa guna.

Kesimpulan

Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan *pertama*, pihak BPKAD telah melakukan komunikasi secara formal dan informal dengan pihak pengguna kendaraan dinas yang telah rusak berat dan telah habis masa pakai. *Kedua*, pihak BPKAD telah mempunyai sumber daya yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya hal ini dibuktikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPKAD ialah sumber daya manusia yang berkompentensi dapat dilihat dari riwayat pendidikan masing-masing pegawai. *Ketiga*, memiliki disposisi yang harus disamakan dengan visi dan misi artinya dalam bekerja pegawai BPKAD telah menjalankan sifat profesionalisme yaitu demokrasi, jujur dan konsisten. *Keempat*, memiliki susunan birokrasi yang lengkap yang memiliki standar operasional prosedur dalam bekerja dan memiliki struktur birokrasi yang baik. Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pekanbaru baik namun belum maksimal disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghambat dalam BPKAD melakukan implementasi penghapusan aset kendaraan dinas di Kota Pekanbaru yaitu lemahnya administrasi dokument dan pandemic COVID-19.

How to cite:

Kaspul, K., & Zulkarnaini, Z. (2022). Implementasi Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), pp. 33-36.

Referensi

- Paywala, R. J. (2021). The Role of Data Creates Opportunities and Challenges for Public Policy Literature Study. *Policy and Social Review*, 1(1), 45-51.
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2021). Space Debris Governance: A Perspective of International Law. *Policy and Social Review*, 1(2), 81-89.
- Yudiatmaja, W. E. (2016). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Yudiatmaja, W. E., Kristanti, D., Prastya, I. Y., Yudithia, Y., Samnuzulsari, T., Suyito, S., & Safitri, D. P. (2021). Social policy on the rural coastal communities: why the implementation fails?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 232, p. 02006). EDP Sciences.
- Yudiatmaja, W. E., Solina, E., Prastya, I. Y., Yudithia, Y., & Samnuzulsari, T. (2022). Paid Plastic Shopping Bags Policy: What the Factors Drive the Implementation? *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), 13-23.